

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BATANG LUPAR
TAHUN 2021

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Kecamatan Batang Lupar atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah bentuk pemenuhan kewajiban kami sebagai pelaporan atas capaian kinerja pembangunan tahun anggaran 2021, termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan di tahun 2021.

Sebagai laporan capaian kinerja, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat capaian-capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan penjelasan atau analisa dalam tiap-tiap indikator yang termuat dalam sasaran-tersebut. Dalam hal melakukan perhitungan sesuai dengan formula yang telah didefinisikan tersebut dihasilkan angka-angka capaian yang menggambarkan prosentase keberhasilan atau kurang berhasilnya kinerja Kecamatan Batang Lupar. Dengan data-data tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi bahan telaah bagi Kecamatan Batang Lupar pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya, dalam rangka menuju tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu.



Lanjak, Januari 2022

Camat Batang Lupar

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, MM

Rembina TK I

NIP. 19711028 199202 1 009

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang NO.01 Lanjak Kode Pos 78766

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. GAMBARAN UMUM	1
1.1.1. PENDAHULUAN	1
1.1.2. SUSUNAN ORGANISASI	2
1.1.3. TUPOKSI	4
1.1.4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)	13
1.1.5. SUMBER DAYA KEUANGAN	13
1.1.6. SARANA DAN PRASARANA	15
1.2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	17
1.3. DASAR HUKUM	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 23
2.1. RENCANA STRATEGIS	23
2.1.1. VISI	23
2.1.2. MISI	25
2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA	27
2.1.4. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN.....	28
2.2. RENCANA KINERJA	28
2.3. PERJANJIAN KINERJA	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 31
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN.....	37
3.3. REALISASI ANGGARAN	47

3.4. PENGUKURAN KINERJA	47
BAB IV PENUTUP	60
Lampiran	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat mengevaluasi diri sendiri. Suatu organisasi maupun instansi entah pihak pemerintahan maupun swasta akan berjalan dengan baik jika melakukan evaluasi demi perbaikan dan penyempurnaan lembaga tersebut. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini akan dimanfaatkan oleh pemberi manfaat sebagai evaluasi dan oleh manajemen Kantor Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu akan digunakan sebagai satu pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja. Laporan ini menjadi indikator untuk membentuk pelayanan yang prima pada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya terjadi peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju serta mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat umum menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan terus menerus dan secara berkesinambungan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, adil, bertanggung jawab, transparansi, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, Kantor Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan strategi dengan visi misi yang jelas, tujuan dan sasaran yang tepat, serta menetapkan cara-cara pencapaian dan sasaran yang tepat pula.

Pada akhirnya dalam mencapai kinerja Kantor Kecamatan Batang Lupar harus bertanggung jawab sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Kecamatan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dengan Visi dan Misi sebagai Berikut:

1. Visi

Adapun visi Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
- b. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- ✓ Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih
- ✓ Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan
- ✓ Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

3. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Kecamatan Batang Lupar adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.
- ✓ Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak.
- ✓ Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Kantor Kecamatan Batang Lupar berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang *Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu* disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, selain tugas pokok Camat juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan meliputi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pertanggung jawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (RENSTRA).

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu merupakan sarana Kantor Camat Batang Lupar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kapuas Hulu dan seluruh stakeholder serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

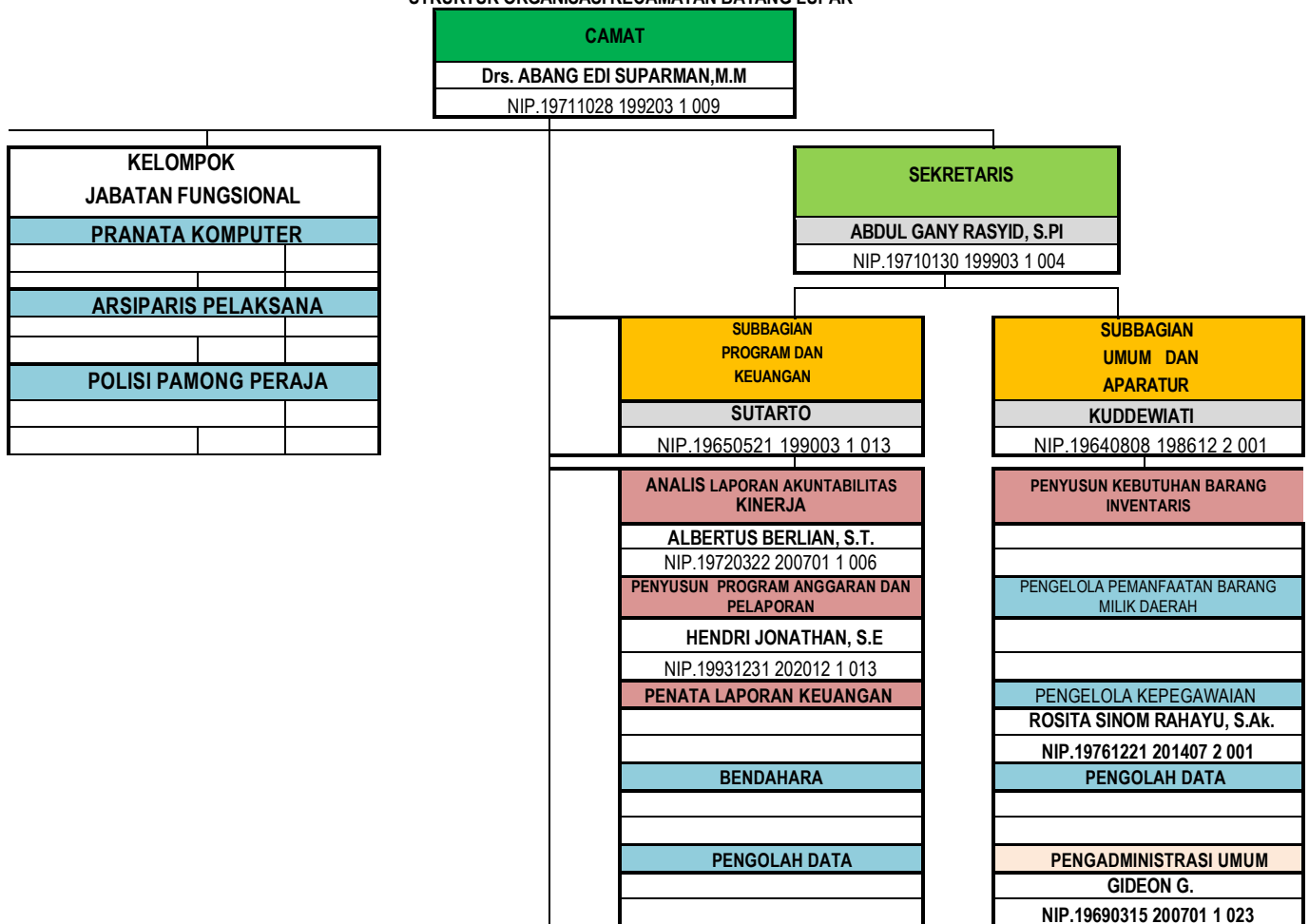
1.1.2. SUSUNAN ORGANISASI

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 46 Tahun 2008 tentang ***Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu***, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat,
- g. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan,
- h. Kepala Sub Bagian Personil dan Umum.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Batang Lupar sesuai PERBUP No. 46 tahun 2008 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG LUPAR



		<table><tr><td>PENGADMINISTRASI KEUANGAN</td></tr><tr><td>ANTONIUS RIMAU</td></tr><tr><td>NIP.19750915 200906 1 003</td></tr></table>		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	ANTONIUS RIMAU	NIP.19750915 200906 1 003	<table><tr><td>PENGADMINISTRASI UMUM</td></tr><tr><td>MASLAN DANA</td></tr><tr><td>NIP.19661025 200701 1 020</td></tr></table>		PENGADMINISTRASI UMUM	MASLAN DANA	NIP.19661025 200701 1 020																																									
PENGADMINISTRASI KEUANGAN																																																				
ANTONIUS RIMAU																																																				
NIP.19750915 200906 1 003																																																				
PENGADMINISTRASI UMUM																																																				
MASLAN DANA																																																				
NIP.19661025 200701 1 020																																																				
<table><tr><td>SEKSI PEMERINTAHAN</td></tr><tr><td>AHMAD AMRI</td></tr><tr><td>NIP.19650517 198612 1 001</td></tr></table>		SEKSI PEMERINTAHAN	AHMAD AMRI	NIP.19650517 198612 1 001	<table><tr><td>SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</td></tr><tr><td>BADU ISKANDAR</td></tr><tr><td>NIP.19640407 198512 1 003</td></tr></table>		SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BADU ISKANDAR	NIP.19640407 198512 1 003	<table><tr><td>SEKSI KESEJAHTERAA N RAKYAT</td></tr><tr><td>AKHMADDAR</td></tr><tr><td>NIP.19640518 198612 1 001</td></tr></table>		SEKSI KESEJAHTERAA N RAKYAT	AKHMADDAR	NIP.19640518 198612 1 001	<table><tr><td>SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</td></tr><tr><td>ARDI SAMSUL</td></tr><tr><td>NIP.19640419 198612 1 001</td></tr></table>		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ARDI SAMSUL	NIP.19640419 198612 1 001																																	
SEKSI PEMERINTAHAN																																																				
AHMAD AMRI																																																				
NIP.19650517 198612 1 001																																																				
SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																																																				
BADU ISKANDAR																																																				
NIP.19640407 198512 1 003																																																				
SEKSI KESEJAHTERAA N RAKYAT																																																				
AKHMADDAR																																																				
NIP.19640518 198612 1 001																																																				
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																																																				
ARDI SAMSUL																																																				
NIP.19640419 198612 1 001																																																				
<table><tr><td>ANALIS TATA PRAJA</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGOLAH DATA</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</td></tr><tr><td>JONATAN JONI</td></tr><tr><td>NIP.19790614 201001 1 007</td></tr><tr><td>PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN</td></tr><tr><td>AGUSTINUS EMPAYA</td></tr><tr><td>NIP.19741122 200906 1 001</td></tr><tr><td>PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		ANALIS TATA PRAJA			PENGOLAH DATA			PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JONATAN JONI	NIP.19790614 201001 1 007	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	AGUSTINUS EMPAYA	NIP.19741122 200906 1 001	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN			<table><tr><td>ANALIS PEMBANGUNAN</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN</td></tr><tr><td>RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak</td></tr><tr><td>NIP.19850401 201101 1 001</td></tr><tr><td>PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMB.</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGADMINISTRASI UMUM</td></tr><tr><td>ANDREAS TIMOTIUS JANTING</td></tr><tr><td>NIP.19680403 200701 1 047</td></tr></table>		ANALIS PEMBANGUNAN			PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak	NIP.19850401 201101 1 001	PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMB.			PENGADMINISTRASI UMUM	ANDREAS TIMOTIUS JANTING	NIP.19680403 200701 1 047	<table><tr><td>ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGADMINISTRASI UMUM</td></tr><tr><td>DONITIUS</td></tr><tr><td>NIP.19671205 200906 1 002</td></tr></table>		ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT			PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL			PENGADMINISTRASI UMUM	DONITIUS	NIP.19671205 200906 1 002	<table><tr><td>ANALIS POLISI PAMONG PRAJA</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PETUGAS KEAMANAN</td></tr><tr><td>BELYAMIN R.</td></tr><tr><td>NIP.19791007 200502 1 003</td></tr></table>		ANALIS POLISI PAMONG PRAJA			PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN			PETUGAS KEAMANAN	BELYAMIN R.	NIP.19791007 200502 1 003
ANALIS TATA PRAJA																																																				
PENGOLAH DATA																																																				
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																																																				
JONATAN JONI																																																				
NIP.19790614 201001 1 007																																																				
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN																																																				
AGUSTINUS EMPAYA																																																				
NIP.19741122 200906 1 001																																																				
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN																																																				
ANALIS PEMBANGUNAN																																																				
PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN																																																				
RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak																																																				
NIP.19850401 201101 1 001																																																				
PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMB.																																																				
PENGADMINISTRASI UMUM																																																				
ANDREAS TIMOTIUS JANTING																																																				
NIP.19680403 200701 1 047																																																				
ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT																																																				
PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL																																																				
PENGADMINISTRASI UMUM																																																				
DONITIUS																																																				
NIP.19671205 200906 1 002																																																				
ANALIS POLISI PAMONG PRAJA																																																				
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN																																																				
PETUGAS KEAMANAN																																																				
BELYAMIN R.																																																				
NIP.19791007 200502 1 003																																																				

1.1.3. TUPOKSI

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu*, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

1. Camat,
2. Sekretaris Kecamatan,
3. Seksi Pemerintahan,
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan,
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat,
7. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan

1.1.3.1. Kepala Sub Bagian Personil dan Umum.

1.1.3.2. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;

- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3.3. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3.4. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;

- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
- a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3.6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;

- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3.7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja
- b. Kasi Kesejahteraan Rakyat,
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- d. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- e. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- f. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- g. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.3.8. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.3.9. Subbagian Personil dan Umum

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,

- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Kantor Kecamatan Batang Lupar dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 20 orang personil Pegawai Negeri Sipil terdiri dari S-2 1 (satu) orang, S-1 5(lima) orang) orang, SLTA 14(Empat Belas) orang, :

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S ₂	S ₁	D ₃	D ₂	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
<i>Eselon</i>											
IIIa	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IIIb	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IV	-	-	-	-	6	-	-	1	6	-	-
Jumlah	1	1	-	-	6	-	-	2	6	-	-
<i>Non Eselon</i>	-	4	-	-	8	-	-	1	4	7	-
Total	1	5	-	-	14	-	-	3	10	7	-

1.1.5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sarana penunjang lain dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun Anggaran 2021 adalah sumber dana, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai di Kantor Batang Lupar Hulu dalam menjalankan tugas pokoknya. Berikut ini rincian rencana anggaran keuangan Kantor Kecamatan Batang Lupar 2021 :

**RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN
KANTOR KECAMATAN
BATANG LUPAR TAHUN 2021**

No	JENIS SUMBER DANA	JUMLAH(Rp)	TARGET(Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Operasi	2.254.385.463,00	2.254.385.463,00
2	Belanja Modal	34.179.300,00	34.179.300,00
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
	Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi perangkat Daerah		
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	1.160.000,00	1.160.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.000,00	1.090.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.149.963,00	1.769.149.963,00
	2. Pelaksanaan Pentatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	121.380.000,00	121.380.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.000,00	2.772.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.365.800,00	23.365.800,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.584.000,00	3.584.000,00
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	38.444.000,00	38.444.000,00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.959.000,00	29.959.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	37.379.300,00	37.379.300,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000,00	8.520.000,00
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.860.000,00	38.860.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.905.000,00	12.905.000,00

	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan		
	1. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.050.000,00	39.050.000,00
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.977.200,00	9.977.200,00
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	1. Pemeliharaan kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal dan Regional dan Nasional	77.200.000,00	77.200.000,00
V.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Desa		
	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.218.500,00	62.218.500,00
Jumlah Total Anggaran		2.288.564.763,00	2.288.564.763,00

1.1.6. SARANA DAN PRASARANA

Kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana terdiri dari barang bergerak yaitu tanah, gedung kantor dan barang bergerak terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang Kantor Kecamatan Batang Lupar

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1	Gedung kantor	1 Unit	Baik	
	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik	
	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik	
	Ruang Kasubag Umum dan Personalia	1 Ruang	Baik	

	Ruang Kasubag Porgram dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
	Ruang Operator E KTP+Oprator Siak	1 Ruang	Baik	
	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik	
	Dapur	1 Ruang	Baik	
	Gudang	1 Ruang	Baik	
	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
	WC / Toilet	4 Ruang	Baik	
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
3	Rumah Dinas Sekcam	1 unit	Baik	

Kondisi Sarana Pendukung

Kantor Kecamatan Batang Lupar

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua	10	9	1	
2	Komputer	-	-	-	
3	Note Book	11	8	3	
4	TV	3	3	-	
5	AC	6	6	-	
6	Mesin Tik	1	-	1	
7	Mesin Pemotong Rumput	3	2	1	Rusak berat
8	Printer	4	3	1	
9	PC Unit	3	2	1	Rusak berat
10	Genset	1	1	-	
11	Meja Kerja	20	20		
12	Meja Tamu	1	1	-	
13	Tempat tidur	-	-	-	
14	Kursi kerja	12	12	-	
15	Kursi rapat	130	130	-	
16	Meja Komputer	1	1	-	
17	Kursi Tamu	2 set	2 set	-	
18	Lemari Arsip	12	12	-	
19	Papan Data	3	3	-	
20	HelM Pol PP	3	-	3	Rusak berat
21	Dinamo	1	1	-	
22	Pet Pol PP	2	-	2	Rusak berat
23	Alat dapur	1 set	1 set	-	
24	Proyektor / Infokus	1 Unit	-	1	Rusak

25	SSB	1 Unit	1	-	
26	Parabola	1 Unit	-	1	Rusak
27	Wireless	1	1	-	

1.2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu dan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1.2.1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah senantiasa harus dilakukan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan. Kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagai sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

1.2.2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, nguasaan komunikasi, dan pemahaman

terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam pencapaian pemerintahan kecamatan. Dengan kata lain, budaya kerja aparatur yang lebih menekankan pada semangat kerja dapat menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

1.2.3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan kecamatan. Sedangkan penyelenggaraan manajemen publik menata pada sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan. Jika demikian pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasi melalui penataan sistem dan prosedur kerja, pembinaan pegawai, memperbaiki Reward dan Punishment System perbaikan kesejahteraan pegawai, dan mengubah kultur organisasi.

1.2.1. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Oleh karena itu,

managemen keuangan dan barang daerah menjadi suatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Managemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan bukan kebijakan.

Sistem managemen keuangan daerah merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang baik di Kecamatan. Bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan perencanaan dan pengeluaran pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accuntability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistempelaporan. (2) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah, (3) Pengamanan barang daerah, (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
- 5) 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 12) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2021;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 25) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan. Kantor Batang Lupar Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, mempunyai pertimbangan potensi, peluang dan kendala/hambatan yang akan dihadapi melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Instansi dilini terdepan didalam menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Rencana Strategis berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur bagi Kantor Kecamatan Batang Lupar dalam melaksanakan tugas pokok, tugas umum dan fungsi serta kewenangannya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis mencakup visi misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulutahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
- b. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan

meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

- c. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2.1.2 Misi Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggirannya sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan adalah uraian dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu (1 s/d 5 tahun). Untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi dan misi Kantor Kecamatan Batang Lupar dengan memformulasikannya dengan jelas dan memanfaatkan sumber daya dan kemanusiaan yang dimiliki. Perumusan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijakan, dan kegiatan untuk merealisasikan misi.

Tujuan strategi tersebut sebagai berikut :

- a. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih”* adalah Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Batang Lupar.
- b. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan”* adalah meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak.
- c. Tujuan strategi untuk mencapai misi: *“Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”* Meningkatnya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2.1.4. STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi Kantor Kecamatan Batang Lupar tahun 2021 yang dijabarkan kedalam kebijakan. Dalam Pengembangan atau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, visi dan misi, Kantor Kecamatan Batang Lupar mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan kantibmas, sosial budaya dan kerukunan beragama, adalah menciptakan upaya pendekatan kepada semua unsur masyarakat, budaya dan tokoh-tokoh agama.
2. Kebijakan untuk mencapai tujuan tercapainya masyarakat Damai sejahtera adalah meningkatkan usulan program pembangunan keagamaan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat adalah : menciptakan tata usaha Kantor Kecamatan Batang Lupar yang tertib, transparan, bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

2.2. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan kedepan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan kegiatan untuk dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021. Rencana kinerja Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 sebesar Rp 2.288.564.763,00(*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh*

Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran APBD, yang diberikan kewenangan kepada Kantor Kecamatan Batang Lupar untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Lupar
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	%	100
		2	Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	%	100
		3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100
Tujuan 2: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan					
3	Meningkatnya pembangunan di masyarakat Kecamatan Batang Lupar	5	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	%	30
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	6	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	75
		7	Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	%	100
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	8	Prosentase pengurus PKK yang aktif	%	100
		9	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	%	100
Tujuan 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan					
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	10	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Batang Lupar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Batang Lupar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaranstrategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Batang Lupar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2	=100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Batang Lupar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian targetsasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama SKPD. telah ditetapkan 6(enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Sasaran Pertama : *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* terdiri dari 3 indikator, yakni:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur,
 - Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti, dan
 - Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.
- ❖ Sasaran Kedua : *Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar* terdiri dari 1 indikator, yakni:
 - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
- ❖ Sasaran Ketiga: *Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar* terdiri dari 1 indikator, yakni:
 - Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan.
- ❖ Sasaran Keempat : *Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan* terdiri dari 2 indikator, yakni:
 - Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dan
 - Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu.
- ❖ Sasaran Kelima : *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa* terdiri dari 2 indikator, yakni:
 - Prosentase pengurus PKK yang aktif, dan
 - Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu.
- ❖ Sasaran Keenam : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan* terdiri dari 1 indikator, yakni:
 - Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Batang Lupar menetapkan 6 (Enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja (outcome). Hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung dan indikator yang merupakan tupoksi SKPD lain serta untuk Indikator yang terukur pada tahun 2021 dalam RENSTRA 2016-

2021 Kecamatan Batang Lupar ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator.

2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Batang Lupar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batang Lupar tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	PERSEN TASI CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	100	73,85	73,85
		Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	100	100	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	75	75

	pemerintahan Kecamatan Batang Lumar				
3	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lumar	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	30	30	100
4	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75	89.47	119,29
		Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	100	100	100
		Prosentase pengurus PKK yang aktif	100	100	100
6	Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti	100	100	100

cara umum Kecamatan Batang Lumar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Batang Lumar Tahun 2016-2021 sebanyak 6 (enam) sasaran tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Batang Lumar, dari 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Batang Lumar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Batang Lumar Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	10%
2	Sesuai Target	70%
3	Tidak Mencapai Target	20 %

Dari Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Sasaran

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1	Sasaran 1	3	-	-	2	100	1	75
2	Sasaran 2	1	-	-	-	-	1	75
3	Sasaran 3	1	-	-	1	100	-	-
4	Sasaran 4	2	1	119,29	1	100	-	-
5	Sasaran 5	2	-	-	2	100	-	-
6	Sasaran 6	1	-	-	1	100	-	-
JUMLAH		10	1	10	7	70	2	20

Dari 6 Sasaran dengan 10 indikator kinerja, pencapaiannya kinerja Kecamatan Batang Lupar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
A	SASARAN 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	75
2	Sesuai Target	2	100
3	Tidak Mencapai Target	-	
B	SASARAN 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	75
C	SASARAN 3		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-
D	SASARAN 4		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	119,29
2	Sesuai Target	1	100

3	Tidak Mencapai Target	-	-
E	SASARAN 5		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	2	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-
F	SASARAN 6		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya,
- Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek,
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta,
- Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 6 sasaran dan 10 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batang Lupar tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur	90	85	90	95	100	73,5
		Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	80	100	100	95	100	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	80	100	95	95	100	100

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator : *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur, Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti, Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.*

Capaian tiga indikator pada sasaran 1 adalah sbb :

1. Untuk capaian kinerja pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur* dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 150 orang dibagi 10 desa yang ada di kecamatan Batang Lupar, dari target yang ditetapkan 100 persen ternyata tidak terealisasi sepenuhnya hanya 73,50%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Pada tahun 2012-2019 Kantor Camat Batang Lupar masih melayani KTPe, sedangkan mulai tahun 2020 sampai sekarang tidak melayani KTPe dikarenakan alat untuk merekam KTPe rusak, sehingga masyarakat harus ke kabupaten.
 - Dalam pelayanan pembuatan KK baru, penggantian KK tidak semuanya selesai tepat waktu dikarenakan beberapa hal ,seperti : gangguan jaringan, kerusakan genset, dan kesalahan teknis penginputan data.
2. Untuk capaian kinerja indikator *Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindaklanjuti sudah sesuai target yang ditentukan yaitu 100% dan terealisasi 100% (sesuai data pada pengukuran kinerja kasi trantib)*
3. Untuk capaian kinerja dalam indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan*, petugas atau aparatur langsung merespon dan menyelesaikan persoalan masyarakat saat itu juga.

Tahun 2021 adalah tahun kelima Renstra, capaian tahun 2021 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Capaian ini ditunjang dengan terbentuknya Tim Pelayanan Terpadu Kecamatan Batang Lupar. Akan tetapi, masih didapati hambatan dalam pencapaian kinerja indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur*, yaitu tempat pelayanan harus tertata dengan baik dan nyaman dengan fasilitas seperti komputer dan printer yang baik.

Dalam Peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kepastian Biaya Pelayanan

Nilai-nilai Biaya Pelayanan kenapa mendapatkan nilai paling tinggi dikarenakan semua pelayanan di Kecamatan Batang Lupar digratiskan atau tanpa dipungut biaya. Hal ini dihindari supaya dalam pelayanan masyarakat tidak lagi memberikan tips kepada petugas pelayanan atau bahkan masyarakat ingin pelayanan cepat maka dilakukan biaya diluar ketentuan. segala pungutan tidak diberlakukan di Kecamatan Batang Lupar. Seandainya ada pegawai yang disuap akan diberi sanksi yang tegas bahkan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Kenyamanan Pelayanan

Kenyamanan Pelayanan yang seharusnya mendapat prioritas tinggi, akan tetapi ruangan yang dikhususkan untuk pelayanan belum tersedia. Dalam konteks ini, Camat Batang Lupar membuat kebijakan dengan menyediakan meja besar yang menampung pelayanan supaya setiap masyarakat yang datang cepat direspon dan dilayani dengan baik.

3. Kejelasan Petugas Pelayanan

Setiap awal tahun, Camat Batang Lupar selalu membuat Surat Keputusan tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan tujuan untuk membagi petugas dan penanggungjawab setiap hari. Hal ini dibuat untuk memberi kejelasan petugas pelayanan dalam memberikan keterangan secara jelas dan transparan serta untuk memberi pelayanan yang diharapkan bagi masyarakat.

Capaian indikator kinerja Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti sebesar 100 %. **Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pencapaian Indikator** Prosentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti dipatok target 100 % dan capaian kinerja mencapai

100 %, dengan perkataan lain semua keluhan atau pengaduan masyarakat direspon dengan baik.

Laporan keluhan /pengaduan dapat dikirim melalui nomor Group Whassap yang sudah dibuat oleh Camat sendiri. Bagi, masyarakat yang tidak bisa menggunakan fasilitas android dapat mengirim keluhan melalui aparaturnya masing-masing atau datang langsung ke Kantor Camat Batang Lumar. Sehingga, masyarakat dapat melaporkan keluhan/pengaduan secara langsung.

Capaian kinerja nyata indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan* adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini untuk pertama kali dilakukan sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun lalu. Tahun 2021 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2021 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan, target ini sudah berjalan 100 %.

Penunjang capaian kinerja indikator *Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan* yang didukung oleh program peningkatan peran kecamatan diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparaturnya, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparaturnya, program peningkatan peran kecamatan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun output program ini adalah peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

4. Adanya pembagian tugas dari masing-masing aparatur;
5. Sarana gedung yang sudah memadai;

Faktor Penghambat :

1. Prasarana yang belum memadai;
2. Kurangnya jumlah SDM dalam melaksanakan tugas;
3. Latar belakang pendidikan SDM belum sesuai dengan *job description*;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melengkapi prasarana yang masih kurang;
2. Mengajukan permohonan penambahan personil untuk Kecamatan Batang Lupar;
3. Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan profesional dalam pelaksanaan tugas;

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur
Pemerintahan Kecamatan Batang Lupar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70	80	80	80	100	100

Capaian kinerja nyata indikator *Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur* sebesar 75 % dari target 100 % yang di rencanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Capaian akhirnya tidak sesuai target yang ada, yakni 75 %. Sarana dan prasarana pendukung kerja hampir semua tersedia terutama untuk ATK, Laptop, Printer, Meja dan Kursi, tetapi 1 unit Accu, panel surya dan inverter tahun 2021 sudah dianggarkan ternyata tidak terbeli dikarenakan anggaran yang ditetapkan tidak mencukupi, maka untuk tahun 2022 anggarannya dinaikkan. Walau demikian untuk standar pelayan kecamatan dinilai sudah memadai. Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

**Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat
Kecamatan Batang Lupar**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	10	12	70	25	35	35

Target kinerja nyata untuk indikator *Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan* tahun 2021 sangatlah kecil yakni 30 %. Kecilnya target yang akan dicapai karena usulan pembangunan melalui Musrenbang sangatlah banyak. Akan tetapi, capaian 30 % ini dinilai sangat baik atau sesuai target disebabkan meningkatnya Dana Desa, yaitu mencapai 100 %. Usulan tidak hanya diakomodir melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah saja tetapi juga dapat tertuang dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Dana Desa, dan 5 (lima) skala prioritas untuk tiap desanya.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	55	60	85	70	75	85
		Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	80	90	95	95	100	100

Pada indikator *Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu* diberi target kinerja 75 % dengan capaiannya 85 %, sehingga capaian kinerjanya 89,47 %. Kecamatan Batang Lupar belum berani mematok target 100% karena untuk memberikan pelayan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten, sedangkan untuk Kartu Keluarga terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan. Keterlambatan ini disebabkan oleh ketersediaan blangko KK yang memang terbatas, jaringan yang tidak stabil, dan tidak tersedianya listrik di siang hari atau pada saat jam kerja sehingga harus menggunakan genset dengan konsekuensi biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Hambatan-hambatan di atas tidak bisa dihindari, oleh karena itu sebagai solusi untuk KTPe dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	80	80	95	95	100	100
		Prosentase pengurus PKK yang aktif	80	100	95	95	100	100

Dalam perjanjian kinerja tahun 2021 target yang ingin dicapai Pemerintahan Kecamatan Batang Lupar dalam indikator *Prosentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu* yaitu 100 % dari semua 10 pemerintahan desa yang ada. Akan tetapi, capaian kinerjanya juga 100 %, sehingga realisasinya mencapai 100 %. Hal ini tidak terlepas dari Pendamping Desa dan Tim Verifikasi Kecamatan baik dalam memperlancar pembuatan pelaporan maupun dalam pelaporan Dana Desa secara online.

Anggaran Dana Desa sangat membantu dalam pencapaian target indikator *Prosentase pengurus PKK yang aktif*. Dalam perjanjian kinerja 2021 *Prosentase pengurus PKK yang aktif* ditargetkan 100 % capaiannya juga 100 %, sehingga realisasi kinerja 100 %. Dengan aktifnya pengurus PKK di setiap desa dipicu oleh ketersediaan Anggaran Dana Desa yang tidak hanya membayar honor para pengurus PKK tetapi juga mengakomodir kegiatan PKK, seperti kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di setiap desa.

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					
			TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti	85	85	95	95	100	100

Capaian kinerja indikator Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebesar 100% target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga nilai capaian kinerjanya diharapkan 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan Kantor Kecamatan Batang Lupar adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Kantor Kecamatan Batang Lupar besarnya anggaran tahun 2021 sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah disetujui adalah Belanja Operasi Rp. 2.254.385.463,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan belanja Modal sebesar Rp. 34.179.300,00,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Rincian/target anggaran dan realisasi anggaran kantor Kecamatan Batang Lupar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Jenis Belanja	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentasi realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	2.254.385.463,00	2.197.052.335,00	97,46
2	Belanja Modal	34.179.300,00	31.979.300,00	93,56
	TOTAL	2.288.564.763,00	2.229.031.635,00	

3.4. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan kegiatan pengumpulan data dan pemantuan atas kemajuan dari indikator kinerja yang telah di capai, dibandingkan dengan perencanaan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut ini :

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN BATANG LUPAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	1 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	100	73.85	73.85
		2 Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		3 Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	74.07%	74.07%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1 Predikat SAKIP	CC	CC	50.00

3	penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Kecamatan Batang Lupar	1	Persentase Usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	30%	30%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	1	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75%	89.47%	119.29%
		2	Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2	Persentase pengurus PKK yang aktif	100%	100%	100%



Lanjak, Januari 2022
Camat Batang Lupar

[Signature]
Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711028 199203 1 009

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

48

PENGUKURAN KINERJA

LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKRETARIS : SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang	1.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan	2.	Persentase Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran di Kecamatan yang tepat waktu	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana yang memadai	3.	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	90%	66,67%	74%
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	4.	Persentase Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.160.000,00	1.160.000,00	1.010.000	87,07%
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.000,00	1.090.000,00	940.000	86,24%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.149.963	1.769.149.963	1.733.066.835	97,96%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	121.380.000,00	121.380.000,00	108.990.000	89,79%
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100%
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	100%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.772.000	2.772.000	2.772.000	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.365.800	23.365.800	23.365.800	100%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100%
11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	3.584.000,00	3.584.000,00	3.584.000,00	100%
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.444.000,00	38.444.000,00	38.444.000,00	100%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	29.959.000	29.959.000	29.959.000	100%

14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.379.300	37.379.300	31.979.300	85,55%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
16	Penyediaan Jasa Komunitas Sumber Daya Air Dan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	100%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.860.000	38.860.000	36.600.000	94,18%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.905.000,00	2.905.000,00	12.905.000,00	100%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0%

Sekretaris kecamatan Batang Lupa



ABDUL GANY RASYID, S.Pi,

Pembina

NIP. 197101 30 199903 1 004

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

51

PENGUKURAN KINERJA

LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKRETARIS : Kasubbag Umum dan Aparatur

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	1.	Jumlah Dokumen Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara(kendaraan roda 2)	5 Laporan	5 Laporan	100%
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	4 Unit	66,67%
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	12 Unit	100%

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1.	Administrasi, Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.095.000	1.095.000	1.095.000	100%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.524.800	100.524.800	100.524.800	100%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.379.300	37.379.300	31.979.300	85,55%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.180.000	52.180.000	49.920.000	95,67%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.905.000	13.905.000	12.905.000	92,81%

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur



KUDDEWIATI

NIP.19640808 198612 1 001

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

53

PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKRETARIS : Kassubag Keuangan

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
Terlaksananya Laporan Kinerja dan Keuangan	2	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000	3.410.000	3.110.000	91,20
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.891.624.963	1.891.624.963	1,843.151.835	97,44

Kepala Subbagian Program dan Keuangan



SUTARTO

NIP. 19650521 199003 1 013

KECAMATAN BATANG LUPAR
 Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

54

PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKSI : Pemerintahan

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.050.000	39.050.000	39.050.000	100%

Kepala Seksi Pemerintahan



AHMAD AMRI

NIP. 19650517 198612 1 001

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

55

PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN TRIWULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKSI : Trantib

TRIWULAN : Sampai dengan Triwulan IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
<i>Terlaksananya Jasa Tenaga Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar</i>	1 Jumlah Laporan Jasa Tenaga, Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar	4 Laporan	4 Laporan	100%

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100%

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



ARDI SAMSUL
NIP. 19640419 198612 1 001

KECAMATAN BATANG LUPAR
Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

56

PENGUKURAN KINERJA

LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKSI : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	30%	30%	100%
	2.	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.977.200	9.977.200	9.977.200	100%
Terlaksanannya Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	62.218.500	62.218.500	60.118.500	96,62%

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan


 BADU ISKANDAR
 NIP.19640407 198612 1 003

 KECAMATAN BATANG LUPAR
 Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

57

PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN TRI WULAN UNIT KERJA TAHUN 2021

SEKSI : Kesejahteraan Masyarakat

TRIWULAN : IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	1 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	4 Laporan	4 Laporan	100%
	2 Persentase Pengurus PKK yang Aktif	100%	100%	100%

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	68.200.000	68.200.000	68.200.000	100%
Terlaksananya Kegiatan PKK	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat



AKHMADAR

NIP. 19640518 198612 1 001

KECAMATAN BATANG LUPAR
 Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

58

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Batang Lupar merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD.

Tahun Anggaran 2021, Kantor Kecamatan Batang Lupar melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi 12 (dua belas) kegiatan untuk 6 (enam) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat, maka Kantor Kecamatan Batang Lupar mendapat anggaran mencapai Rp. 2.288.564.763,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Pulu Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*). anggaran dari APBD Tahun 2021 untuk membiayai program dan kegiatan diatas. Realisasi anggaran kegiatan di Kantor Kecamatan Batang Lupar adalah sebesar mencapai Rp. 2.229.031.635,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*). atau sebesar 97,40%. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kebijakan Tahun Anggaran 2021 dipaparkan dalam bentuk tabel Rencana Strategis (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2021 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari 6 Sasaran yang dilaksanakan tahun 2021 terdapat 10 % Indikator melampaui target , 80 % sesuai target dan 10 % belum mencapai target dikarenakan target yang ditentukan di Renstra terlalu tinggi, tetapi secara umum termasuk kategori berhasil.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut atas kerja keras Kantor Kecamatan Batang Lupar serta dukungan seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan. Pencapaian tersebut dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Kantor Kecamatan Batang Lupar tetap berpedoman kepada visi yang ada *"Terbentuknya Pelayanan Yang Prima Pada Masyarakat dan Menciptakan Kehidupan Masyarakat Di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Yang Sejahtera, Damai, Demokratis, Berkeadilan, Berdaya Saing, Maju Serta Mandiri dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa"*.



Batang Lupar, Januari 2022

Camat Batang Lupar

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19711028 199202 1 009

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

60



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No 01 Lanjak, Kode Pos 76766

Lanjak, 24 Januari 2022

Nomor : 005 / 12 / KBTR / Sekc.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi
Kinerja Triwulan IV tahun
2021.

Kepada,
Yth. 1. Sekcam
2. Kasi dan Kasubbag
3. Staf Kantor Kecamatan
Batang Lupar
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 068 / 29 / SETDA / ORG tanggal 06 Januari 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, untuk itu akan dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2021 pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Januari 2022
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KAMAT BATANG LUPAR,

Drs ABANG EDI SUPARMAN, M. M.

Pembina Tk. I

NIP. 19711028 199203 1 009

NOTULEN RAPAT

"EVALUASI KINERJA KECAMATAN BATANG LUPAR"

TAHUN 2021

Hari, tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batang Lupa

Pimpinan Rapat : Camat Batang Lupa

Moderator : Sekretaris Kecamatan

Peserta : Seluruh Kasi, Kasubbag dan Staf Kecamatan Batang Lupa

Notulen : Rosita Sinom Rahayu, S.Ak

Perihal : Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagai berikut :

1. Kehadiran Peserta

Evaluasi Kinerja 2021 dihadiri oleh Kasi, Kasubbag dan Staf Kecamatan Batang Lupa.

2. Uraian pelaksanaan rapat

a. Evaluasi Kinerja 2021 di buka oleh Bapak Camat Batang Lupa

Evaluasi Kinerja pada hari ini untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja seluruh kasi, kasubbag serta staf Kecamatan Batang Lupa Tahun Anggaran 2021, juga menjadi acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Jenis Pelayanan Kecamatan.

b. Laporan dari masing-masing Kasi dan Kasubbag

1. Kasubbag Umum dan Aparatur

Lima dari Enam Realisasi Kegiatan tercapai 100% hanya terdapat 1 kegiatan yang tercapai 66,67% yaitu kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikarena beberapa target yang tidak bisa terealisasi. Sedangkan untuk realisasi anggarannya, 2 dari kegiatan terealisasi 100%. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 95,67%, dan untuk kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi 85,55% serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi 92,81%.

2. Kasubbag Program dan Keuangan

Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.

3. Kasi Pemerintahan

Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.

4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan

Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 96,62%.

5. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.

6. Kasi Trantib

Realisasi kegiatan tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran tercapai 100%.

c. Laporan terkait Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terhadap pelayanan aparatur dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 150 orang dibagi 10 desa yang ada di kecamatan Batang Lupar, dari target Score yang ditetapkan 100 ternyata tidak terealisasi sepenuhnya hanya 73,85 saja score yang tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Pada tahun 2012-2019 Kantor Camat Batang Lupar masih melayani KTP-e, sedangkan mulai tahun 2020 sampai sekarang tidak melayani KTP-e dikarenakan alat untuk merekam KTP-e rusak, sehingga masyarakat harus ke kabupaten.
- Dalam pelayanan pembuatan KK baru, penggantian KK tidak semuanya selesai tepat waktu dikarenakan beberapa hal, seperti: gangguan jaringan, kerusakan genset, dan kesalahan teknis penginputan data.

2. Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti

Untuk capaian kinerja indikator Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti sudah sesuai target yang ditentukan yaitu 100% dan terealisasi 100% (sesuai data pada pengukuran kinerja kasi trantib)

3. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan, petugas atau aparatur langsung merespon dan menyelesaikan persoalan masyarakat saat itu juga.

4. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dari target yang ditetapkan 100% ternyata tidak terrealisasi semuanya dikarenakan dari 6 sarana dan prasarana kantor yang dianggarkan ada 2 unit yang tidak terealisasi dikarenakan harga barang melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

5. **Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan**
Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.
6. **Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu**
Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dari target yang ditetapkan 75% terealisasi 89,47%, berarti sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 119,29%.
7. **Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu**
Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu, dari target yang ditetapkan 100% dapat terelisasi semuanya sesuai dengan target yang ditetapkan.
8. **Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu**
Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu yang ditetapkan 100% terealisasi 100%.
9. **Persentase pengurus PKK yang aktif**
Untuk capaian kinerja dalam indikator Persentase pengurus PKK yang aktif, dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100% dikarenakan organisasi PPK dari tingkat pedesaan (10 desa) sampai tingkat kecamatan semuanya aktif.
10. **Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti**
Untuk capaian kinerja dalam indikator indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti disesuaikan dengan desakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memerintahkan Pemerintahan Kecamatan untuk menindaklanjuti semua temuan BPK terutama dalam mendata Aset Tanah dan Bangunan yang ada di kecamatan.

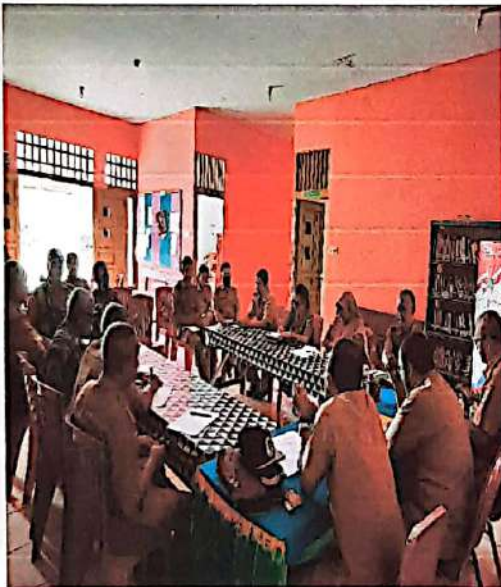
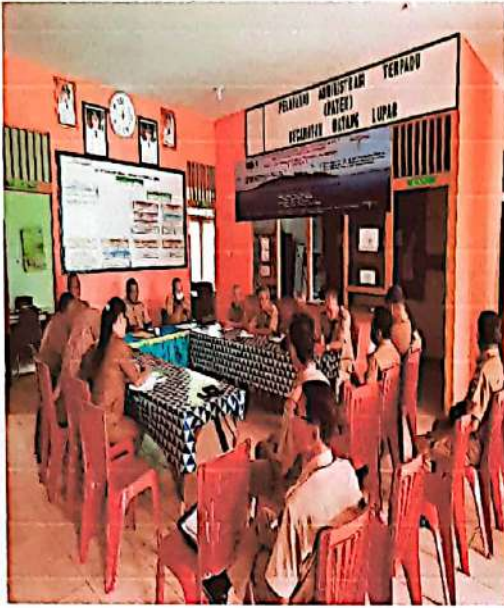
Diharapkan Capaian Kinerja tersebut tetap dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi pada Tahun Anggaran 2022 sehingga kinerja yang pada Kantor Kecamatan Batang Lupar dapat lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi.



Pembina Tk. I

NIP. 19711028 199203 1 009

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT



DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021
DIAULA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M. M.	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Camat	Lanjak	1.
2	ABDUL GANY RASYID, S. Pi	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Sekcam	Lanjak	2.
3	AHMAD AMRI	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasi Pem	Lanjak	3.
4	BADU ISKANDAR	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasi Ekbang	Lanjak	4.
5	ARDI SAMSUL	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasi Trantib	Lanjak	5.
6	AKHMADDAR	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasi Kesra	Lanjak	6.
7	KUDEDEWIATI	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasubbag Umum dan Aparatur	Lanjak	7.
8	SUTARTO	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Kasubbag Program dan Keuangan	Lanjak	8.
9	ALBERTUS BERLIAN, S. T	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Lanjak	9.
10	HENDRI JONATHAN, S.E	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Lanjak	10.
11	BELYAMIN. R	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Petugas Keamanan	Lanjak	11.
12	RICARDUS MARONG PASSA, S. Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Analisis Pembangunan	Lanjak	12.
13	ROSITA SINOM RAHAYU, S. Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Lanjak	13.
14	GIDEON. G	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Umum	Lanjak	14.
15	A. T. JANTING	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Umum	Lanjak	15.
16	ANTONIUS RIMAU	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Keuangan	Lanjak	16.
17	DONITIUS	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Umum	Lanjak	17.
18	JONATAN JONI	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Kependudukan	Lanjak	18.
19	AGUSTINUS EMPAYA	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Pemerintahan	Lanjak	19.
20	MASLAN DANA	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Pengadministrasi Umum	Lanjak	20.
21	ANUAR FEBRI, A. Md	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Staf Kasubbag Umum dan Aparatur	Lanjak	21.
22	AGUSTINA	Kantor Kecamatan Batang Lupa	Staf Kasi Pem	Lanjak	22.
23	NELVI	Kantor Kecamatan Batang Lupa	CS	Lanjak	23.
24					24.
25					25.

MONITORING CAPAIAN KINERJA
CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	100	15,00	17,46	18,46	22,93	73,85	73,85	-	-	-
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindak lanjuti	100%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%	100,00%			
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%	100,00%			
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Batang Lupar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	0%	0%	74,07%	0%	74,07%	74,07%			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Predikat SAKIP	CC	-	-	-	CC	CC	CC	-	-	-
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	100%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
3	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Persentase Usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	30%	30,00%	-	-	-	30,00%	100,00%	-	-	-
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	75%	15,00%	20,00%	25,00%	29,47%	89,47%	119,29%			
		Persentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	100%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%	100,00%			
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Laporan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Tepat Waktu	100%	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
		Persentase pengurus PKK yang aktif	100%	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	100,00%	100,00%			
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	100%	0,00%	0,00%	24,27%	75,73%	100,00%	100,00%	1.160.000	1.160.000	100,00%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	0,00%	45,60%	0,00%	54,40%	100,00%	100,00%	1.160.000	1.010.000	87,07%

NO.	SASARAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100%	21,54%	25,43%	26,49%	26,54%	100,00%	100,00%	1.090.000	940.000	86,24%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,55%	16,87%	31,83%	36,75%	100,00%	100,00%	1.769.149.963	1.733.066.835	97,96%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	24,06%	20,73%	24,96%	30,25%	100,00%	100,00%	121.380.000	108.990.000	89,79%
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.095.000	1.095.000	100,00%
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	0%	9,13%	22,84%	68,03%	100,00%	100,00%	1.095.000	1.095.000	100,00%
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	-	-	
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	10,84%	10,97%	26,59%	51,60%	100,00%	100,00%	2.772.000	2.772.000	100,00%
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0,00%	13,18%	40,54%	46,28%	100,00%	100,00%	23.365.800	23.365.800	100,00%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	100%	16,67%	16,67%	33,33%	33,33%	100,00%	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	0%	23,72%	28,85%	47,43%	100,00%	100,00%	3.584.000	3.584.000	100,00%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	14,58%	20,41%	21,51%	43,50%	100,00%	100,00%	38.444.000	38.444.000	100,00%

NO.	SASARAN/ INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	100%	0%	28,07%	0%	71,93%	100,00%	100,00%	29.959.000	29.959.000	100,00%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0%	0%	80,55%	0%	80,55%	80,55%	37.379.300	31.979.300	85,55%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	13,33%	20,45%	25,00%	41,22%	100,00%	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00%
21	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	16,67%	17,50%	21,00%	44,83%	100,00%	100,00%	3.000.000	3.000.000	100,00%
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	13,52%	17,32%	27,04%	42,12%	100,00%	100,00%	8.520.000	8.520.000	100,00%
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	15,00%	24,32%	25,54%	35,14%	100,00%	100,00%	38.860.000	36.600.000	94,18%
24	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	11,27%	20,22%	22,79%	45,72%	100,00%	100,00%	12.905.000	12.905.000	100,00%
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	1.000.000	-	0,00%
26	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan	Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	16,20%	25,20%	25,40%	33,20%	100,00%	100,00%	39.050.000	39.050.000	100,00%
27	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Batang Lupar	Tertaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	30%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	9.977.200	9.977.200	100,00%

NO.	SASARAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
28	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Tercapainya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	5,84%	11,01%	24,09%	59,06%	100,00%	100,00%	77.200.000	77.200.000	100,00%
29	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Tercapainya Pelayanan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	14,00%	20,51%	24,23%	41,26%	100,00%	100,00%	62.218.500	60.118.500	96,62%

Lanjak, Januari 2022

Camat Batang Lupar
Kabupaten Kapuas Hulu,

EDY SUPARMAN, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19711028 199203 1009

MONITORING CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	42,86%	14,29%	14,29%	28,57%	100,00%	100,00%			
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan	Persentase Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran di Kecamatan yang tepat waktu	90%	14,29%	14,29%	28,57%	42,86%	100,00%	111,11%			
3	Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana yang memadai	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	90%	-	-	66,67%	-	66,67%	74,07%			
4	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	Persentase Jumlah dokumen laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu	100%	-	50,00%	-	50,00%	100,00%	100,00%			
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	100%	0,00%	0,00%	24,27%	75,73%	100,00%	100,00%	1.160.000	1.160.000	100,00%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	0,00%	45,60%	0,00%	54,40%	100,00%	100,00%	1.160.000	1.010.000	87,07%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100%	21,54%	25,43%	26,49%	26,54%	100,00%	100,00%	1.090.000	940.000	86,24%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,55%	16,87%	31,83%	36,75%	100,00%	100,00%	1.769.149.963	1.733.066.835	97,96%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	24,06%	20,73%	24,96%	30,25%	100,00%	100,00%	121.380.000	108.990.000	89,79%
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.095.000	1.095.000	100,00%
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	0%	9,13%	22,84%	68,03%	100,00%	100,00%	1.095.000	1.095.000	100,00%
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	-	-	

13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	10,84%	10,97%	26,59%	51,60%	100,00%	100,00%	2.772.000	2.772.000	100,00%
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0,00%	13,18%	40,54%	46,28%	100,00%	100,00%	23.365.800	23.365.800	100,00%
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	100%	16,67%	16,67%	33,33%	33,33%	100,00%	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	0%	23,72%	28,85%	47,43%	100,00%	100,00%	3.584.000	3.584.000	100,00%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	14,58%	20,41%	21,51%	43,50%	100,00%	100,00%	38.444.000	38.444.000	100,00%
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	0%	28,07%	0%	71,93%	100,00%	100,00%	29.959.000	29.959.000	100,00%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0%	0%	80,55%	0%	80,55%	80,55%	37.379.300	31.979.300	85,55%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	13,33%	20,45%	25,00%	41,22%	100,00%	100,00%	1.800.000	1.800.000	100,00%
21	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	16,67%	17,50%	21,00%	44,83%	100,00%	100,00%	3.000.000	3.000.000	100,00%
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	13,52%	17,32%	27,04%	42,12%	100,00%	100,00%	8.520.000	8.520.000	100,00%
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	15,00%	24,32%	25,54%	35,14%	100,00%	100,00%	38.860.000	36.600.000	94,18%
24	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	11,27%	20,22%	22,79%	45,72%	100,00%	100,00%	12.905.000	12.905.000	100,00%
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	1.000.000	-	0,00%

Lanjak, Januari 2022

Sekretaris Kecamatan Batang Lupar

Kabupaten Kapuas Hulu,



Pembina

NP 19710130 199903 1004

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	3.410.000	3.110.000	91,20%
2	Terlaksananya Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1.891.624.963	1.843.151.835	97,44%

Lanjak, Januari 2022

Kepala Subbagian Program dan Keuangan
Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu,



**MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	100,00%	52.180.000	49.920.000	95,67
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	100,00%	100.524.800	100.524.800	100,00
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	100,00%	-	-	
4	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	1.095.000	1.095.000	100,00
5	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	-	-	4 Unit	0%	4 Unit	66,67%	37.379.300	31.979.300	85,55
6	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	12 Unit	100,00%	13.905.000	12.905.000	92,81

Lanjak, Januari 2022

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu,



NIP. 19640808 198612 2 001

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	30%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	9.977.200	9.977.200	100,00
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	75%	12,00%	18,51%	20,23%	24,26%	75,00%	100,00%	62.218.500	60.118.500	96,62

Lanjak, Januari 2022
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu,



MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BATANG LUPAR
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	100,00%	39.050.000	39.050.000	100,00

Lanjak, Januari 2021

Kepala Seksi Pemerintahan

Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu,


[Signature]
AJIMAD AMRI
 Pejabat Tingkat I
 NIP. 19650517 198612 1 001

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASI KESRA KECAMATAN BATANG LUPAR
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	4 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	4 Laporan	100,00%	58.200.000	58.200.000	100,00
		Persentase pengurus PKK yang aktif	100%	14,00%	20,51%	24,23%	41,26%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00

Lanjak, Januari 2022

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu,



AKHIMADDAR
Penata Tingkat. I

NIP. 19640518 198612 1 001

MONITORING CAPAIAN KINERJA
KASI TRANTIB KECAMATAN BATANG LUPAR
TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar	Jumlah Laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Batang Lupar	4 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	4 Laporan	100%	9.000.000	9.000.000	100,00

Lanjak, Januari 2022

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu,


ARDY SAMSUL
Pangkat. I
NIP. 19640419 198612 1 001